

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa:

#### **4.1.1 Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 belum dilaksanakan dengan maksimal. Jumlah anggaran responsif gender dari tahun 2016-2020 sangat minim dan terus mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016 jumlah anggaran gender sebesar 4.086.200.000 dan kemudian berturut-turut dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebesar 4.673.612.000, 6.187.720.000, dan 6.746.407.000, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 4.938.760.000. Sedangkan untuk kegiatan ujian kesetaraan gender alokasinya selama lima tahun cenderung mengalami penurunan secara signifikan, di mana tahun 2016 dialokasikan sebesar 1.776.055.000, kemudian tahun 2017 turun menjadi 1.678.085.000, dan selanjutnya berturut-turut untuk tahun 2018, 2019, dan 2020 sebesar 1.209.550.000, 1.005.850.000, dan 869.170.000. Berdasarkan pengalokasian dan jumlah anggaran responsif gender Kota Pekalongan tahun 2016-2020 belum mendapatkan alokasi yang memadai dan terus mengalami penurunan berakibat output dan outcome kegiatan menjadi tidak tercapai. Di samping itu, di dalam perencanaan anggaran tidak terdapat upaya pengarusutamaan gender

yang dibuktikan dengan tidak adanya alokasi umum yang mainstream gender atau 0%. Dapat dikatakan bahwa anggaran responsif gender belum diterapkan di Kota Pekalongan, sehingga pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pekalongan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender masih jauh dari harapan.

#### **4.1.2 Kendala yang dihadapi dalam kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Kendala yang dihadapi dalam kebijakan anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan meliputi:

1) Kendala kebijakan, yaitu lemahnya kekuatan hukum bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam anggaran dan lemahnya komitmen Pemerintah Kota dalam membuat perencanaan anggaran responsif gender. Lemahnya komitmen pemerintah Kota Pekalongan dalam membuat perencanaan anggaran responsif gender ditunjukkan dari :

(a) Tidak adanya aturan yang mendorong penerapan Permendagri No 15 Tahun 2008 mengakibatkan kekuatan hukum bagi keharusan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tiap SKPD tidak begitu kuat dan mengikat.

(b) Penyelenggaraan dan pembentukan panitia sosialisasi pengarusutamaan gender masih dirasa hanya berupa formalitas bentuk kegiatan saja. Selain itu, komitmen

pemerintah Kota Pekalongan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender masih sangat lemah karena anggaran responsif gender belum dijadikan isu prioritas dalam penganggaran.

- 2) Kendala struktural, yaitu kurangnya kapasitas tim penyusun anggaran yang mampu analisis gender, dominasi struktur pemangku kebijakan, kinerja Dinas masih dirasa belum adil gender, dan tidak adanya kerjasama khusus dalam anggaran responsif gender.
- 3) Kendala Kultural, meliputi:
  - (a) Nilai patriarki yang begitu kental di masyarakat.
  - (b) Sehingga ketimpangan relasi gender sangat sulit dirubah.
  - (c) Pandangan gender dan anggaran responsif gender menurut stakeholder masih salah kaprah.

## **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan formulasi masalah telah berhasil dirumuskan sejumlah rekomendasi, yaitu rekomendasi pada level substansi anggaran, level kebijakan, pada level struktural dan level kultural. Rekomendasi pada keempat level ini diharapkan mampu memberikan perubahan pada ketiga stakeholder dalam siklus anggaran yaitu legislatif, eksekutif dan masyarakat.

### **1. Rekomendasi di Level Substansi Anggaran**

- (a) Perlu adanya instrumen untuk mengukur target dan capaian anggaran pada anggaran responsif gender.

(b) Kreativitas untuk menciptakan pos-pos anggaran yang dinilai responsif gender dengan kebutuhan laki-laki maupun perempuan sehingga pos anggaran tidak terkesan monoton.

## 2. Rekomendasi di Level Kebijakan

(a) Perlunya aturan dalam bentuk peraturan daerah atau Surat Edaran Walikota dan yang lainnya untuk mendorong penerapan Permendagri No 15 Tahun 2008 dalam mewujudkan anggaran daerah responsif gender.

(b) Perlunya ketentuan yang menjamin penerapan anggaran responsif gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di Kota Pekalongan.

(c) Perlu adanya keberpihakan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya responsif gender. Selain itu juga perlunya pertimbangan faktor-faktor pendukung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling berhubungan antar dokumen satu dengan yang lainnya.

## 3. Rekomendasi di Level Struktural

Kerjasama dalam bentuk asistensi teknis mulai dari tingkat perencanaan sampai perumusan anggaran responsif gender untuk Tim Anggaran Eksekutif dan Badan Anggaran Legislatif dengan tenaga ahli di bidang analisis anggaran. perguruan tinggi khususnya pusat studi gender atau pihak lain

yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Operasional asistensi teknis meliputi:

(a) Melakukan analisis situasi, yaitu memahami situasi yang terjadi pada perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, lansia perempuan, dan lansia laki-laki. dilakukan dengan melihat data terpilah gender dan data sensitif gender.

(b) Menyusun kegiatan yang responsif gender sebagai respon dari analisis situasi.

(c) Memasukkan isu gender dalam program/proyek/kegiatan tersebut dengan memasukkan satu atau lebih dari empat indikator pemberdayaan yang berkeadilan gender, yaitu akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol.

#### 4. Rekomendasi Level Kultural

(a) Perlunya inovasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalam perencanaan anggaran dan membangun keberanian perempuan melalui *public hearing*.

(b) Perlunya pelatihan anggaran responsif gender secara terus-menerus di kalangan eksekutif, legislatif (Badan Anggaran) dan masyarakat (Organisasi Masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat, dll) dalam rangka membangun kesepahaman yang tepat tentang anggaran responsif gender.

(c) Meningkatkan kesadaran pemangku kebijakan akan pentingnya pelaksanaan anggaran responsif gender sehingga

anggaran responsif gender mampu menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan melalui sosialisasi, kampanye, seminar, dan *workshop*.